

Pemkab Malaka Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian



Ilustrasi: <https://www.batasnegeri.com/>

Pemerintah Kabupaten Malaka meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hal tersebut disampaikan langsung Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan NTT Adi Sudibiyo dalam serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah (LKPD) Tahun anggaran 2019 yang dilakukan secara virtual, Jumat (3/7) di Aula Kantor Bupati Malaka.

Kepala BPK RI Perwakilan NTT Adi Sudibyو mengatakan, penyerahan Opini WTP lazimnya diberikan secara langsung, namun karena Covid-19 maka dilakukan melalui *video conference*.

“Selain itu pihaknya juga telah mengirim LKPD 2019 melalui email Pemkab Malaka dan DPRD Malaka,”ucapnya.

Adi menyampaikan penilaian terhadap LKPD Malaka 2019, dilakukan melalui dua tahapan yakni Februari-Maret 2020 dan April 2020.

“Dari keseluruhan hasil penilaian, BPK RI memberikan Opini WTP untuk Pemkab Malaka,”ujarnya.

Adi juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Malaka atas perjuangan dan kerja keras dimana telah melakukan pembenahan dan mengikuti semua rekomendasi hasil temuan yang disampaikan oleh tim editor.

“Namun, pihaknya masih menemukan beberapa permasalahan terutama penataan aset dan ketersediaan obat dengan harapan masalah tersebut segera ditindaklanjuti sehingga tidak mempengaruhi opini berikutnya,”pungkasnya.

Bupati Malaka Stefanus Bria Seran kepada media dengan gembira menyampaikan Pemerintah Kabupaten Malaka meraih Opini WTP.

“Dan ini pertama kali yang diraih Pemkab Malaka karena sejak tahun 2014-2015 disclaimer, 2016-2018 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)tapi akunnya berkurang.Sedangkan di tahun 2019 kita meraih Opini WTP,” ungkapnya.

Mantan Kadis Kesehatan Provinsi NTT ini mengatakan ada lima kriteria untuk meraih WTP yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, pengungkapan laporan keuangan yang memadai, kepatuhan terhadap undang-undang, efektifitas sistem pengendalian internal, dan tindak lanjut temuan.

“Di dalam LHP pasti ada hal-hal yang ditemukan untuk dilakukan perbaikan dan biasanya kalau WTP itu non material artinya menyangkut administrasi. Misalnya, tentang obat disarankan untuk kita menggunakan aplikasi. Apabila kita melakukan *entry* ada item yang menunjukkan masa kadaluwarsa,” pintanya.

Ia menilai keberhasilan tersebut bukan atas kerja bupati atau sekda tetapi semua tim mulai dari pimpinan OPD sampai ke pemerintah desa.

“Semua komponen dibawa pengawasan dewan dan didampingi para editor untuk terus berjuang bahu membahu sehingga mimpi WTP dapat terwujud di tahun 2019,”ujarnya.

Dengan motto meletakkan fondasi yang kokoh, kuat, dan dinamis,didepan pimpinan OPD secara tegas SBS mengatakan, hasil Opini WTP merupakan wujud dari kerja keras yang dilakukan selama ini.

“Pertahankan apa yang sudah kita raih. Kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas menjadi pedoman untuk kita sehingga ke depan menjadi lebih baik,”ujarnya.

Namun, ada beberapa persoalan yang disampaikan perwakilan BPK NTT menjadi catatan untuk dilakukan pembenahan dan perbaikan.

“Kami berjanji setelah ini akan melakukan rapat pembagian tugas melengkap kekurangan. Setiap tanggal 5 dilakukan rapat pimpinan OPD dipimpin Asisten III, tanggal 10 rapat dengan para kades dipimpin Asisten II dan tanggal 15 rapat dengan dinas PPO dipimpin Asisten I. Ini akan dijadikan budaya,”ujarnya.

Menurut SBS, seluruh kekuatan akan dikerahkan dalam upaya mempertahankan Opini WTP ini. Karena sekian tahun sudah bersama berjuang dan harus mampu mempertahankannya.

“Oleh karena itu atas nama pemerintah dan masyarakat Malaka menyampaikan terimakasih kepada BPK RI melalui perwakilan BPK NTT yang telah melakukan pendampingan dan pemeriksaan secara profesional,” pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Malaka Adrianus Bria Seran atas nama lembaga mengapresiasi raihan Opini WTP LKPD Malaka tahun 2019. Auditor telah bekerja secara objektif dan profesional menilai keuangan daerah. Dengan harapan prestasi tersebut wajib dipertahankan.

“Pemkab Malaka telah pedomani proses akuntansi. Apabila ada kekurangan, diharapkan kedepan bisa diperbaiki dan atas nama lembaga saya ucapkan terima kasih dan perlu dipertahankan,” pinta Adrianus.

Disaksikan VN, pengumuman LKPD tahun 2019 Kabupaten Malaka dilakukan melalui vicon langsung dengan Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Adi Sudibiyo bersama Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran, Sekda Malaka, Donatur Bere, Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran, dan Pimpinan OPD Lingkup Kabupaten Malaka. (bev/ol)

Bupati Malaka usai menerima hasil Opini WTP dari BPK RI Perwakilan NTT Melakukan Foto Bersama Dengan Pimpinan OPD Malaka, di Aula Kantor Bupati Malaka, Jumat (3/7).

Sumber:

1. <https://www.victorynews.id>. Senin, 6 Juli 2020: Pemkab Malaka Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
2. <https://timexkupang.com>. Sabtu, 4 Juli 2020: Perjuangan 4 Tahun Berbuah Manis Pemkab Malaka Raih Opini WTP BPK.

Catatan:

1. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada bagian umum BPK diberi kewenangan melakukan 3 jenis pemeriksaan yaitu:
 - a. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

- b. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
 - c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigative.
2. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
 3. Terdapat 4(empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
 4. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
 5. Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.